

KATALOG: 7102025.1707



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG 2022

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN LEBONG

2022

No. Katalog : 7102025.1707
ISSN :
No. Publikasi : 17070.1925
Ukuran Buku : 21 cm x 15 cm
Jumlah Halaman : xii + 57 Halaman

Naskah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Penyunting

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Diterbitkan Oleh

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG

2022

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Sahranudin SE, M.Si.

Penyunting : Paishal SE.

Penulis : Ikhlasul Fajri, SST

Pengolah Data : Ikhlasul Fajri, SST

Pemeriksa Tabel : Haridha Nurfadilla A.Md.Stat.

<https://lebongkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2021 Kabupaten Lebong adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi kabupaten Lebong dibandingkan kota acuan yang saat ini adalah Kota Makasar.

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh BPS di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data yang dihitung berdasarkan data harga triwulanan bulan Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022. Diagram timbang penghitungan IKK menggunakan data Bill of Quantity (BoQ) dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). IKK tahun 2022 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan pengguna data.

Lebong, 18 Juli 2022

**KEPALA, BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**



Sahranudin SE, M.Si.

NIP. 197109291993021001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
	v
Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Lebong	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xii
Daftar Lampiran	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
BAB II	
METODOLOGI.....	7
2.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data.....	9
2.2 Pemilihan Responden.....	10
2.3 Pemilihan Kualitas	11
2.4 Konsep dan Definisi	12
2.5 Konsep Pemikiran	16
2.6 Metode Perhitungan IKK	18
2.7 Dana Alokasi Umum	21
BAB III	
GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG	23
3.1 Posisi Geografis	25
3.2 Kependudukan	28
3.3 Infrastruktur Jalan	29
3.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Lebong	32
BAB IV	
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG	33

4.1	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lebong	35
BAB V	PENUTUP	39
BAB VI	LAMPIRAN	43

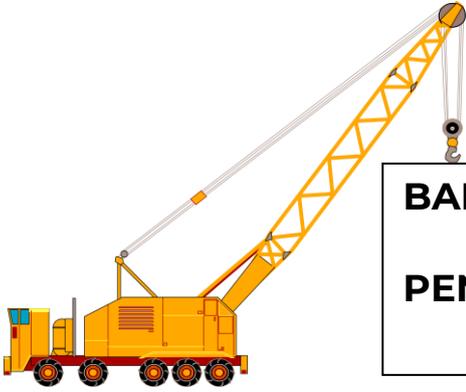
<https://lebongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2021.....	28
Tabel 2	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Lebong menurut Jenis Permukaan, 2020-2021	30
Tabel 3	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Lebong menurut Kondisi Jalan, 2020-2021	31
Tabel 4	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebong, 2020-2021.....	31
Tabel 5	Rincian DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam APBN, 2021 (dalam ribuan rupiah)	32
Tabel 6	Indeks Kemahalan Konstruksi menurut kabupaten di Provinsi Bengkulu, 2021	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Dana Alokasi Umum	22
Gambar 2	Peta Topografi Kabupaten Lebong	26
Gambar 3	Persentase Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong (%)	27
Gambar 4	Perbandingan IKK kabupaten se-Provinsi Bengkulu, 2021	38
Gambar 5	Bagan Sistem Konstruksi.....	46
Gambar 6	Hubungan antara proyek, sistem, dan komponen.....	51
Gambar 7	Proses Perhitungan IKK 2021	55



BAB I

PENDAHULUAN

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah (Otonomi Daerah) adalah suatu kebutuhan yang mendesak demi menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, maka, sebagai bangsa yang berprestasi untuk Cerdas, kita harus berani mengubah pola hubungan pusat-daerah yang paternalistik dan sentralistik itu menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

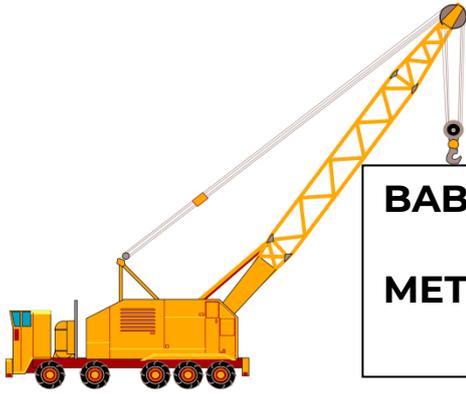
Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan

memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan kebijaksanaan fiskal dan aplikasi pembagian keuntungan dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemerataan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2022 adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2022 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variable kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum untuk pengalokasian 2022

<https://lebongkab.bps.go.id>



BAB II

METODOLOGI

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB II.

METODOLOGI

IKK tahun 2021 dihitung di 514 Kabupaten/kota pada 34 provinsi, termasuk Kabupaten Lebong dan 9 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bengkulu, berdasarkan pedoman pencacahan Survei Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Subdirektorat Statistik Perdagangan Besar. Muatan dalam publikasi ini mencakup:

2.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data IKK mencakup :

1. Harga bahan bangunan, harga sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi meliputi upah dan tunjangan lainnya dari mandor, kepala tukang, tukang batu, tukang cat, tukang listrik, dan pembantu tukang yang digunakan dalam kegiatan konstruksi yang terangkum dalam survei yang dikenal dengan Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi, sewa alat berat, dan upah Jasa Konstruksi dalam rangka Perhitungan IKK tahun 2021 (SHKK 2021).
2. Dalam publikasi IKK Kabupaten Lebong 2021, harga konstruksi tanpa memasukkan *management cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi dibawah harga output. Data tersebut dari dokumen *Bill of Quantity (BoQ)* proyek yang sudah selesai.
3. Kegiatan pencacahan dilaksanakan pada Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan April 2021. Data yang terkumpul

kemudian diproses menggunakan program khusus oleh Subdirektorat Harga Perdagangan Besar Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS Pusat).

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan angka IKK adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan BPS diperoleh melalui responden survei Harga Kemahalan Konstruksi. Pengumpulan data Survei HKK dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Pencacahan dilakukan setiap tanggal 20 s.d. 30 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Responden yang dicacah adalah pedagang grosir yang menjual bahan bangunan, jasa penyewaan alat berat, kontraktor, dan Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dikumpulkan yaitu:

1. Harga bahan bangunan/konstruksi
2. Harga sewa alat berat konstruksi
3. Upah jasa konstruksi.

Adapun yang menjadi responden dalam survey adalah pedagang grosir/distributor/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor, dan kategori lainnya seperti kontraktor, Dinas PUPR atau instansi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat – alat berat dan upah pekerja konstruksi). Sedangkan data sekunder dari Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa data realisasi APBD 2020 sebagai salah satu penimbang IKK.

2.2 Pemilihan Responden

Responden dipilih secara purposif dengan mengutamakan pedagang grosir yang menjual bahan bangunan dan jasa penyewaan alat berat. Data yang dikumpulkan dari pedagang

grosir adalah harga bahan bangunan, sedangkan yang diperoleh dari jasa penyewaan alat berat adalah data harga sewa alat berat dan upah jasa konstruksi. Jika tidak ada pedagang grosir maka dipilih responden dengan skala prioritas yaitu produsen kemudian pedagang campuran, yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar (grosir).

Jumlah responden yang diambil untuk setiap kualitas barang terpilih adalah tiga. Lokasi responden pada survei IKK ini harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Pada setiap periode pencacahan diusahakan responden yang dipilih adalah sama. Namun jika terjadi penggantian responden maka dicari pengganti yang sesuai. Pencacahan dalam survei ini dilakukan dengan kunjungan dengan mewawancarai langsung responden terpilih pada periode pencacahan.

2.3 Pemilihan Kualitas

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang terdapat dalam kuesioner pencacahan survei harga kemahalan konstruksi 2021 (SHKK2021), maka perlu dilakukan pemilihan barang dan kualitas sebagai berikut:

1. Pilih spesifikasi/kualitas barang yang paling banyak terjual pada responden.
2. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode pencacahan harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas tersebut maka dicari pengganti yang setara.
3. Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang ready stock dan diperdagangkan di kabupaten/kota itu sendiri.
4. Spesifikasi/kualitas yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan seperti yang ada dalam SHKK2021

2.4 Konsep dan Definisi

Kualitas hasil pengumpulan data sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman petugas pengumpulan data (pencacah) tentang konsep dan definisi dari istilah yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini. Beberapa istilah dan konsep yang perlu dipahami tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang digunakan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga jumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.
2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga suatu wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.
3. Harga Perdagangan Besar (HPB) adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara pedagang grosir sebagai penjual

- dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar atas suatu barang.
4. Harga Produsen adalah suatu transaksi yang sudah terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.
 5. Harga Eceran adalah harga transaksi yang sudah terjadi antara pedagang sebagai penjual dengan rumah tangga sebagai pembeli yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga langsung bukan untuk ditransaksikan lagi atas suatu barang.
 6. Bahan Bangunan/Konstruksi adalah material yang digunakan dalam membentuk komponen bangunan dan tempatnya pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
 7. Produsen adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.
 8. Pedagang Grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan.
 9. Pedagang Campuran adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga.
 10. Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud

dengan survei ini adalah kegiatan investasi (pembangunan baru bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel, dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan bangunan jaringan komunikasi.

11. Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, biaya jasa operator, dan biaya bahan bakar. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun.
12. Hidraulic Excavator adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ketempat lain.
13. Buldozer/Tracked Tractor adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur / memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
14. Skid Steer Loader adalah suatu loader dengan frame body kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan lift arm (tangan angkat) yang digunakan untuk memasang tools (peralatan) dan tambahan lainnya.
15. Tandem Vibrating Roller adalah mesin penumbuk/pemadat jalan tipe tandem dengan penggerak roda belakang. Peralatan dilengkapi dua roda cylindrical steel wheels (roda baja) dengan ukuran sama dengan perangkat vibrator,

sehingga alat ini juga berfungsi sebagai compactor. Tandem Roller digunakan untuk pekerjaan penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal beton agar diperoleh hasil akhir permukaan yang rata.

16. Vibratory roller adalah suatu alat pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Adapun ukuran tandem/vibrating roller yang masuk dalam kriteria pencacahan yakni <8 ton dan 8-10 ton.
17. Cimpact Track Loader adalah alat berat beroda karet, hanya mampu beroperasi di daerah keras dan rata.
18. Dumptruck adalah dalah kendaraan angkut jarak jauh (truk) mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik untuk menurunkan muatannya. Digunakan untuk mengangkut material lepas (loose material) baik berupa pasir, gravel/kerikil, tanah, dan material mineral/batubara yang digunakan di dunia konstruksi dan pertambangan. Adapun ukuran dump truck yang masuk dalam kriteria pencacahan yakni 8 ton, 12 ton, dan 20 ton.
19. Balas Jasa Konstruksi adalah upah/gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja dibidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (OH). Tunjangan lainnya yang dimaksud adalah semua pendapatan yang diterima oleh tenaga sektor konstruksi yang berupa makan, perumahan/penginapan, jaminan sosial, dan sebagainya.
20. Mandor adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, mandor merangkap kepala tukang.

21. Kepala Tukang adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
22. Tukang Batu adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetol, mal, dan water pass.
23. Tukang Kayu adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll
24. Tukang Listrik adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya, dan memasang sistem listrik generator, trafo, dll
25. Pembantu Tukang adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas membantu semua pekerjaan konstruksi.

2.5 Konsep Pemikiran

IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen cost dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antarproyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan manajemen cost dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity (BoQ)* satu proyek yang sudah selesai.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota

berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/ kota.

2.6 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

dengan :

NK_j = Nilai Komponen

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

dengan

NK_j = nilai komponen

C_i = dummy kab/kota ke-i

P_j = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

α_i dan β_j = Koefisien regresi

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik terimbang (bobot system) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_t} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{sistem_i} \right)^{w^2_i}$$

Dengan

N = jumlah system dalam suatu bangunan

Tahap Perhitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut :

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Dengan

N = jumlah system dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w^1_i} \right) \cdot 100$$

Dengan

N = jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

IKK 2021

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium dan sebagainya. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2020.

IKK tahun 2021 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021. Dalam periode-periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

2.7 Dana Alokasi Umum

1. Pengertian

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dasar hukum penerapan Alokasi Dana Umum yakni Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

2. Alokasi DAU

- DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN,
- Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

a. Formulasi DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi

dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus:

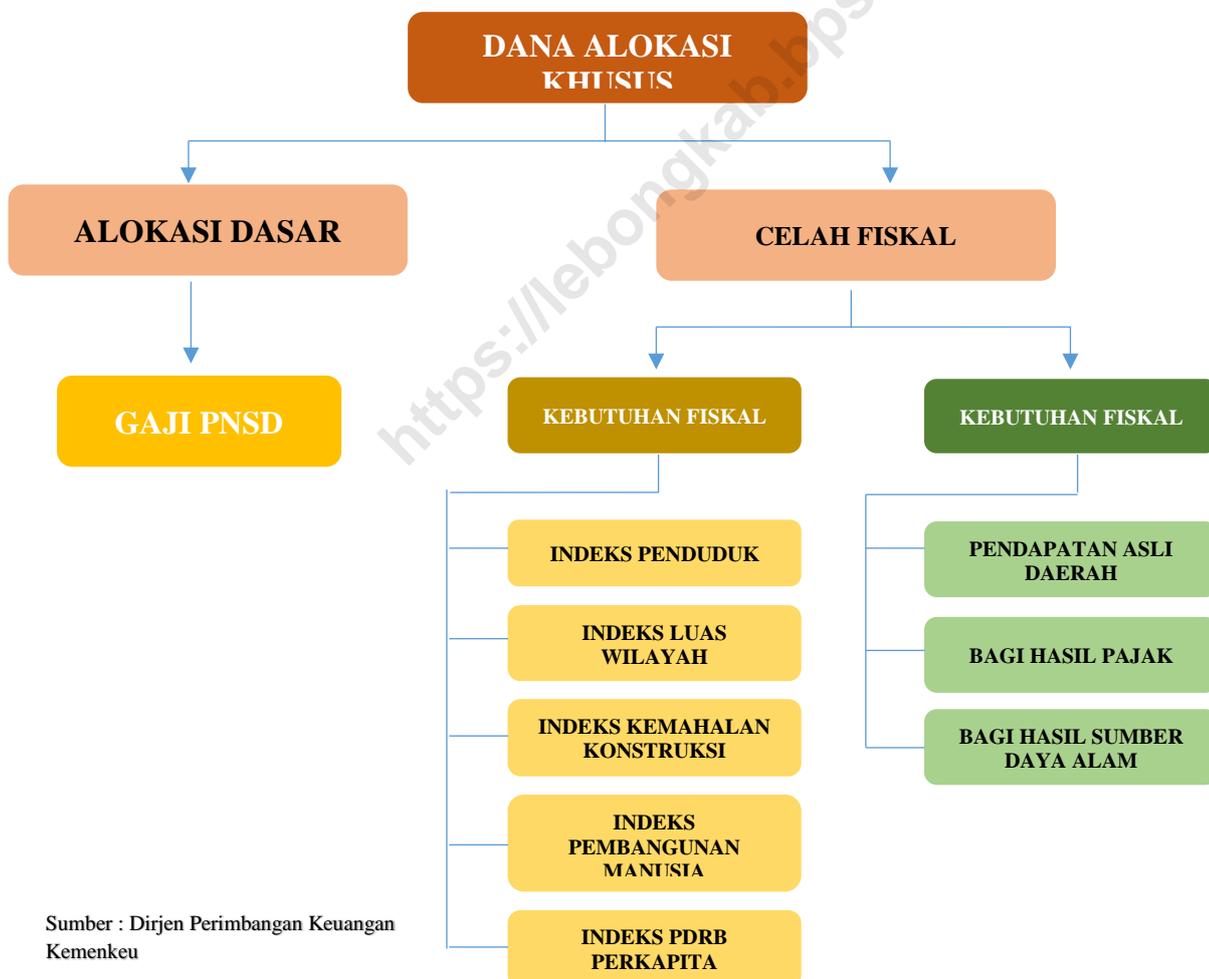
$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan :

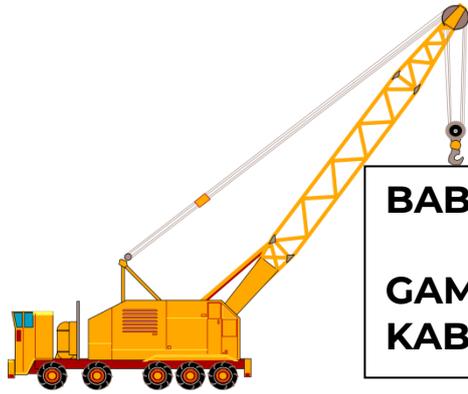
AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Gambar 1. Bagan Dana Alokasi Umum



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan
Kemenkeu



BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB III.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG

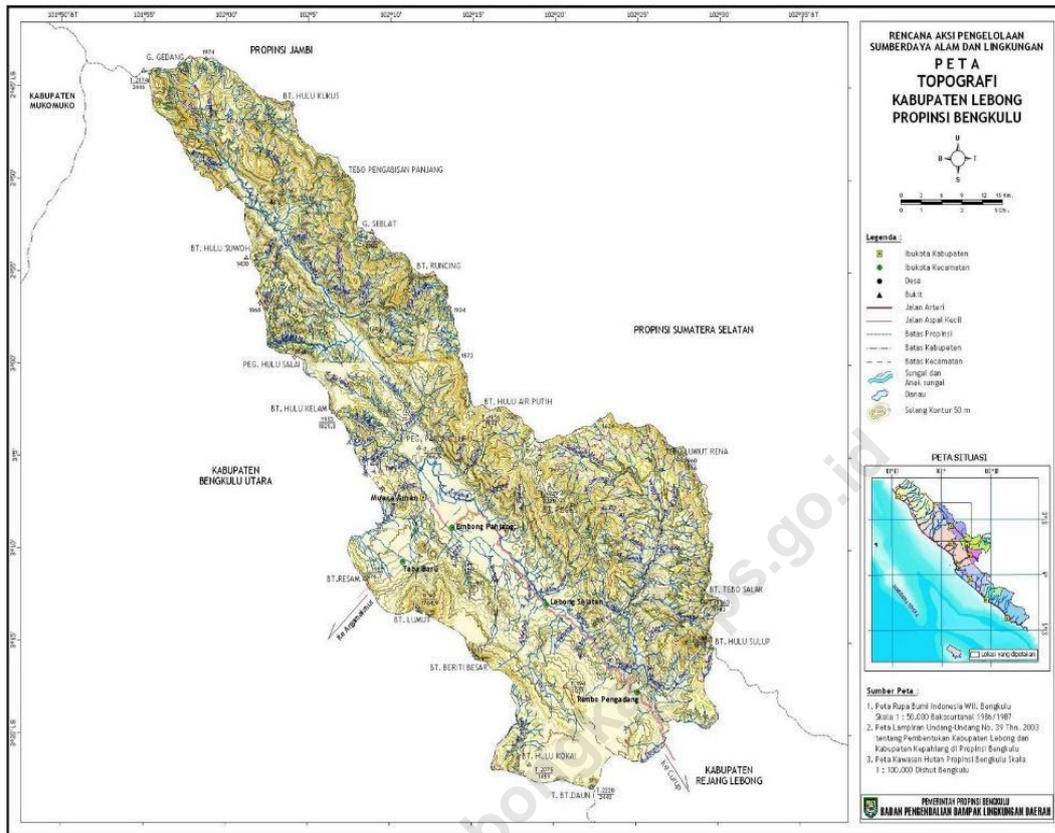
3.1 Posisi Geografis

Kabupaten Lebong adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ibukota Kabupaten Lebong adalah Tubei, berjarak sekitar 120 km dari ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi hamparan yang bervariasi, mulai dari bukit-bukit sampai pegunungan dan didominasi oleh pegunungan yang terbentang dari utara ke selatan serta terklasifikasi sebagai daerah bukit pada ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebesar 58,80 persen wilayah Kabupaten Lebong berada pada ketinggian 500-1000 mdpl, 33,44 persen berada pada 1000-1500 mdpl, dan sisanya 7,76 pada 0-500 mdpl.

Adapun Batas-batas wilayah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

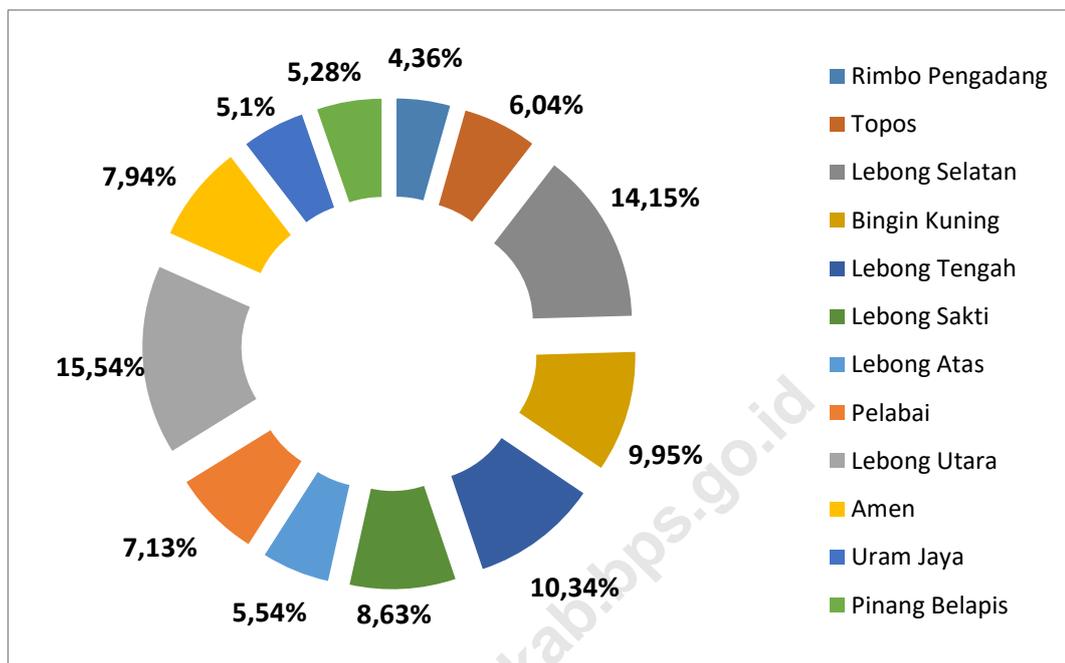
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara

Gambar 2. Peta Topografi Kabupaten Lebong



Berdasarkan hasil analisis spasial tata guna tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong tahun 2020, sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan. Dilihat dari luas menurut kecamatan di Kabupaten Lebong, maka yang terbesar adalah Pinang Belapis dengan persentase 36,51 persen dan Kecamatan Topos 20,68 persen, sedangkan sisanya tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan lainnya.

Gambar 3. Persentase Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong (%)



3.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Lebong berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 sebanyak 106.767 jiwa. Berdasarkan persentase antar kecamatan, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lebong Utara yaitu sekitar hampir 16 persen, kemudian di Lebong Selatan sekitar 14 persen, dan sisanya tersebar di 10 kecamatan lainnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2021

KECAMATAN	JUMLAH (Jiwa)	Persentase penduduk (%)
(1)	(2)	(3)
Rimbo Pengadang	4 655	4,38
Topos	6 450	6,05
Lebong Selatan	15 104	14,17
Bingin Kuning	10 620	9,97
Lebong Tengah	11 034	10,36
Lebong Sakti	9 217	8,65
Lebong Atas	5 917	5,49
Pelabai	7 614	7,08
Lebong Utara	16 595	15,59
Amen	8 476	7,89
Uram Jaya	5 445	5,21
Pinang Belapis	5 640	5,24
JUMLAH	106.767	100

Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka 2022

3.3 Infrastruktur Jalan

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau dan terisolir. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dihitung dengan mengumpulkan sejumlah harga komoditi di bidang konstruksi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam membentuk harga di suatu wilayah antara lain ketersediaan barang dan jasa dan kelancaran pendistribusian barang ke wilayah tersebut. Pada tahun 2021, total panjang jalan di Kabupaten Lebong 565 Kilometer, yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Lebong sepanjang 499 Kilometer sedangkan sisanya yaitu 66 Kilometer merupakan wewenang pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurun dari total jalan pada tahun 2020 yang mencapai 685 km, penurunan panjang ini disebabkan karena rusaknya/putusnya jalan yang telah ada sebelumnya. Untuk data yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel pada bab ini.

Jika dilihat berdasarkan Jenis permukaannya, pada tahun 2021 jalan di Kabupaten Lebong di dominasi oleh jalan yang berpermukaan aspal, dengan luas permuakaan sepanjang 343 km atau sebesar 68,74 persen dari total panjang permukaan jalan di lebong. Krikil menjadi permukaan terpanjang berikutnya di Kabupaten Lebong setelah aspal dengan panjang 87 km atau

17,43 persen, dan masih terdapat jalan dengan permukaan tanah dengan panjang 69 km atau 13,83 persen dari total panjang permukaan jalan di Lebong.

Tabel 2. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Lebong menurut Jenis Permukaan, 2020-2021

Jenis Permukaan	2020		2021	
	Panjang Jalan (Km)	Persen (%)	Panjang Jalan (Km)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aspal	301	55,16%	343	68,74%
Kerikil	75	13,77%	87	17,43%
Tanah	170	31,07%	69	13,83%
Total	546	100.00%	499	100,00%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebong

Adapun menurut kondisi jalan untuk jalan kewenangan Kabupaten Lebong pada tahun 2021 jalan dengan kondisi baik adalah sebanyak 19,44 persen turun drastis dibandingkan pada tahun 2020 dengan persentase 27,02 persen jalan dalam kondisi baik, penurunan ini memverifikasi bahwa terjadi kerusakan jalan diantara selang waktu 2020-2021 sehingga menyebabkan banyaknya kualitas jalan yang menurun bahkan rusak total (penurunan panjang jalan). Sedangkan jalan dengan kondisi sedang meningkat menjadi 17,44 persen, kondisi rusak menurun menjadi 21,04 persen, dan 42,08 persen sisanya masuk pada kategori rusak berat.

Tabel 3. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Lebong menurut Kondisi Jalan, 2020-2021

Kondisi Jalan	2020		2021	
	Panjang Jalan (Km)	Persen (%)	Panjang Jalan (Km)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baik	147,595	27,02%	97	19,44%
Sedang	20,32	3,7%	87	17,44%
Rusak	151,864	27,8%	105	21,04%
Rusak Berat	226,419	41,48%	210	42,08%
Total	546,198	100.00%	499	100,00%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebong

Jalan yang merupakan kewenangan Provinsi merupakan jalan yang menghubungkan satu kabupaten ke kabupaten pada provinsi yang sama. Pada tahun 2020 dan 2021 panjang jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Lebong tidak mengalami perubahan yaitu sepanjang 60 km.

Tabel 4. Panjang Jalan Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebong, 2020-2021

Panjang Jalan	Panjang Jalan (Km)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Total	139	95

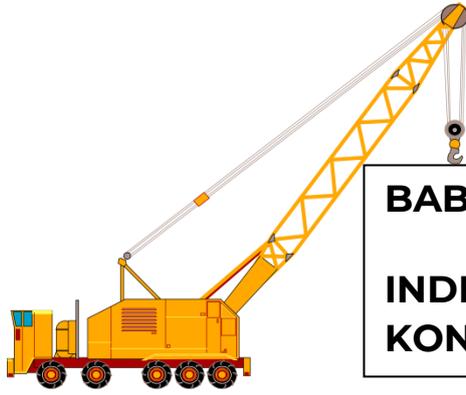
3.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Lebong

Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU, disamping luas wilayah, jumlah penduduk, PDRB dan IPM. Berikut besaran DAU per Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tahun 2021

Tabel 5. Rincian DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam APBN, 2021 (dalam ribuan rupiah)

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	DAU APBD 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1701	Bengkulu Selatan	530,906,845
2	1702	Rejang Lebong	598,933,999
3	1703	Bengkulu Utara	572,101,466
4	1704	Kaur	656,177,855
5	1705	Seluma	421,660,115
6	1706	Mukomuko	483,682,041
7	1707	Lebong	467,469,744
8	1708	Kepahiang	382,660,060
9	1709	Bengkulu Tengah	408,396,965
10	1771	Kota Bengkulu	413,571,049
	1700	Provinsi Bengkulu	1,253,924,758

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan



BAB IV

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB IV

4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lebong

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong tahun 2021 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Lebong dibandingkan kota acuan, yaitu Kota Semarang. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lebong.

Data IKK 2021 dihitung berdasarkan data harga komoditas konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2021 adalah Kota Makassar, berubah dari Kota Semarang di tahun 2018-2020. Sebelumnya, Kota Surabaya dan Kota Samarinda pernah menjadi kota acuan pada penghitungan IKK tahun 2015-2017 dan IKK tahun 2012-2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

IKK tahun 2021 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021. Semakin besar nilai IKK menunjukkan relatif semakin sulit memperoleh bahan bangunan/konstruksi di suatu wilayah dan relatif semakin tinggi harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu

daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam mensuplai bahan bangunan secara independen.

Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi menurut kabupaten di Provinsi Bengkulu, 2021

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1701	Bengkulu Selatan	91.84
2	1702	Rejang Lebong	91.89
3	1703	Bengkulu Utara	94.34
4	1704	Kaur	97.83
5	1705	Seluma	96.77
6	1706	Mukomuko	95.74
7	1707	Lebong	94.85
8	1708	Kepahiang	92.95
9	1709	Bengkulu Tengah	93.74
10	1771	Kota Bengkulu	94.22
11	1700	Bengkulu	94.42

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong tahun 2021 sebesar 94,85 lebih tinggi dari IKK Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar 94,42 Perbandingan IKK 2021 kabupaten se-provinsi Bengkulu, angka IKK Kabupaten Lebong berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Kaur yang berada di urutan keempat sebesar 94,85. IKK tertinggi adalah Kabupaten Kaur sebesar 97.83 dan IKK terendah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 91,84. Artinya adalah dibandingkan dengan kota acuan (Kota Makassar), tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Lebong relatif lebih rendah sebesar 94,85 persen. Di tahun 2021, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki nilai IKK lebih rendah dari kota acuan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab metodologi, IKK disusun dari tiga sumber harga, yaitu harga material, harga sewa alat berat, dan harga upah pekerja konstruksi. Di lihat dari asal barang, material konstruksi dapat berasal dari produk lokal seperti batu bata, pasir, batu pondasi, kayu, kusen, dll serta dapat berasal dari produk luar kabupaten seperti semen, besi, pipa, keramik dan sebagainya yang tidak diproduksi di Kabupaten Lebong.

Masih rendahnya IKK Kabupaten Lebong dibandingkan kota acuan menunjukkan bahwa produk lokal memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan IKK. Kita asumsikan bahwa produk barang konstruksi dari luar Kabupaten Lebong memiliki harga lebih tinggi dari kota acuan, namun karena *share* produk lokal lebih tinggi sehingga secara agregat IKK Kabupaten Lebong relatif lebih rendah.

Gambar 4. Perbandingan IKK kabupaten se-Provinsi Bengkulu, 2021





BAB V

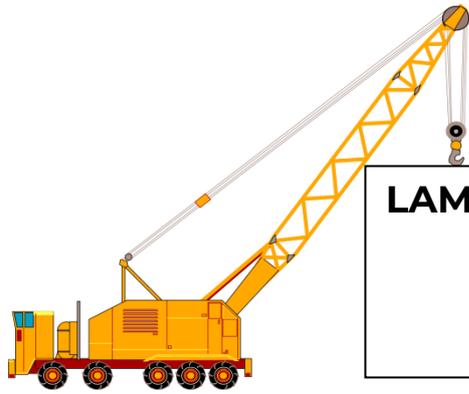
**PENUTUP KABUPATEN
LEBONG**

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB V.

PENUTUP

1. Angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong Tahun 2021 dibangun dari 47 komoditas barang dan jasa konstruksi yang dikumpulkan data harganya pada periode Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021.
2. Angka IKK digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan pembangunan infrastruktur di suatu daerah dan digunakan sebagai alat bantu pemerintah pusat dalam menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Angka IKK Kabupaten Lebong tahun 2021 adalah sebesar 94,85 adalah relatif lebih rendah dibanding kota acuan (Makassar).
4. Di Provinsi Bengkulu, angka IKK Kabupaten Lebong berada di urutan keempat tertinggi, angka IKK tertinggi berada di Kabupaten Kaur yakni sebesar 97,83 sedangkan angka IKK terendah berada di Kabupaten Bengkulu Selatan yakni sebesar 91,84.



LAMPIRAN

<https://lebongkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

A. Penghitungan Diagram Timbang IKK 2021

Basket of Construction Components Approach (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs (ICP)* tahun 2005. Metode pendekatan ini di desain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BoQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*. Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 5. Bagan Sistem Konstruksi



Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta.

- c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
- a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.

- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
<i>Site-work</i> (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
<i>Substructure</i>	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian

	bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya.
<i>Superstructure</i>	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
<i>Exterior Shell / Building Envelope</i>	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada sistem <i>superstructure</i> pada bangunan.
<i>Interior Partitions</i>	Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan.
<i>Interior and Exterior Finishes</i>	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.
<i>Mechanical and Plumbing</i>	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya.
<i>Electrical</i>	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan.

Sistem Konstruksi untuk jenis bangunan lainnya adalah sebagai berikut :

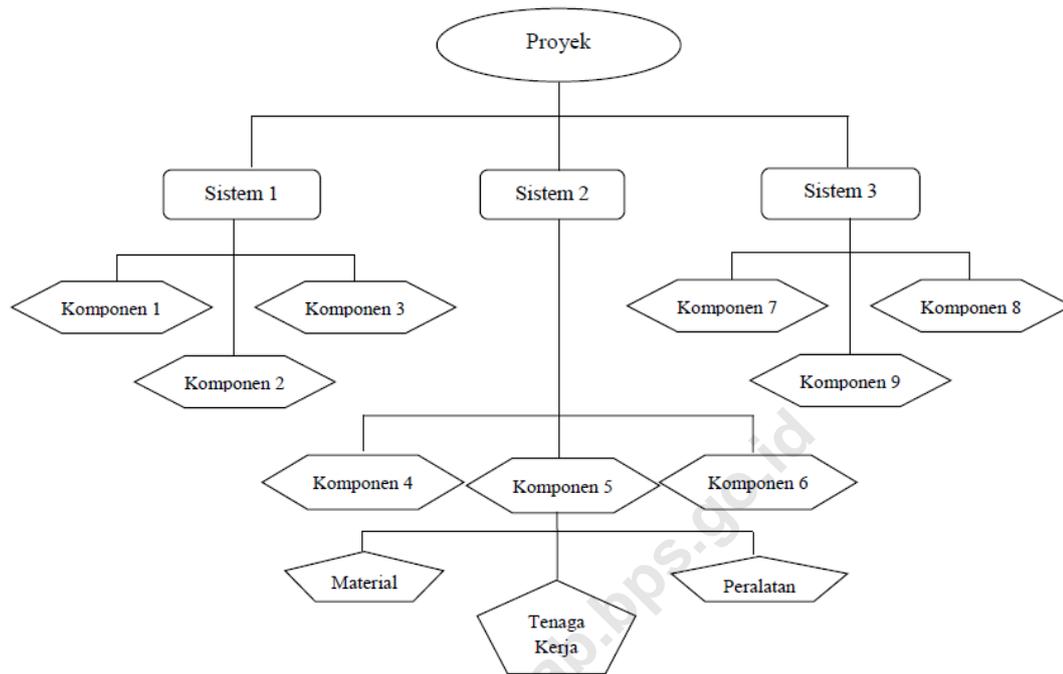
Nama Sistem	Penjelasan Sistem
<i>Site-work</i> (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
<i>Substructure</i>	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya.
<i>Superstructure</i>	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem

	ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
<i>Mechanical Equipment</i>	Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower pendingin, dan lainnya.
<i>Electrical Equipment</i>	Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya.
<i>Underground Utility</i>	Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, <i>fiber optic cable</i> , dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah.

Komponen Konstruksi

Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Gambar 6. Hubungan antara proyek, sistem, dan komponen



Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut. Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan,

bangunan umum untuk jaringan air, listrik, dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Prosedur Penghitungan Penimbang

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2020.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota

Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang sistem. Penimbang material digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu volume dari material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu *share* nilai sistem dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan.

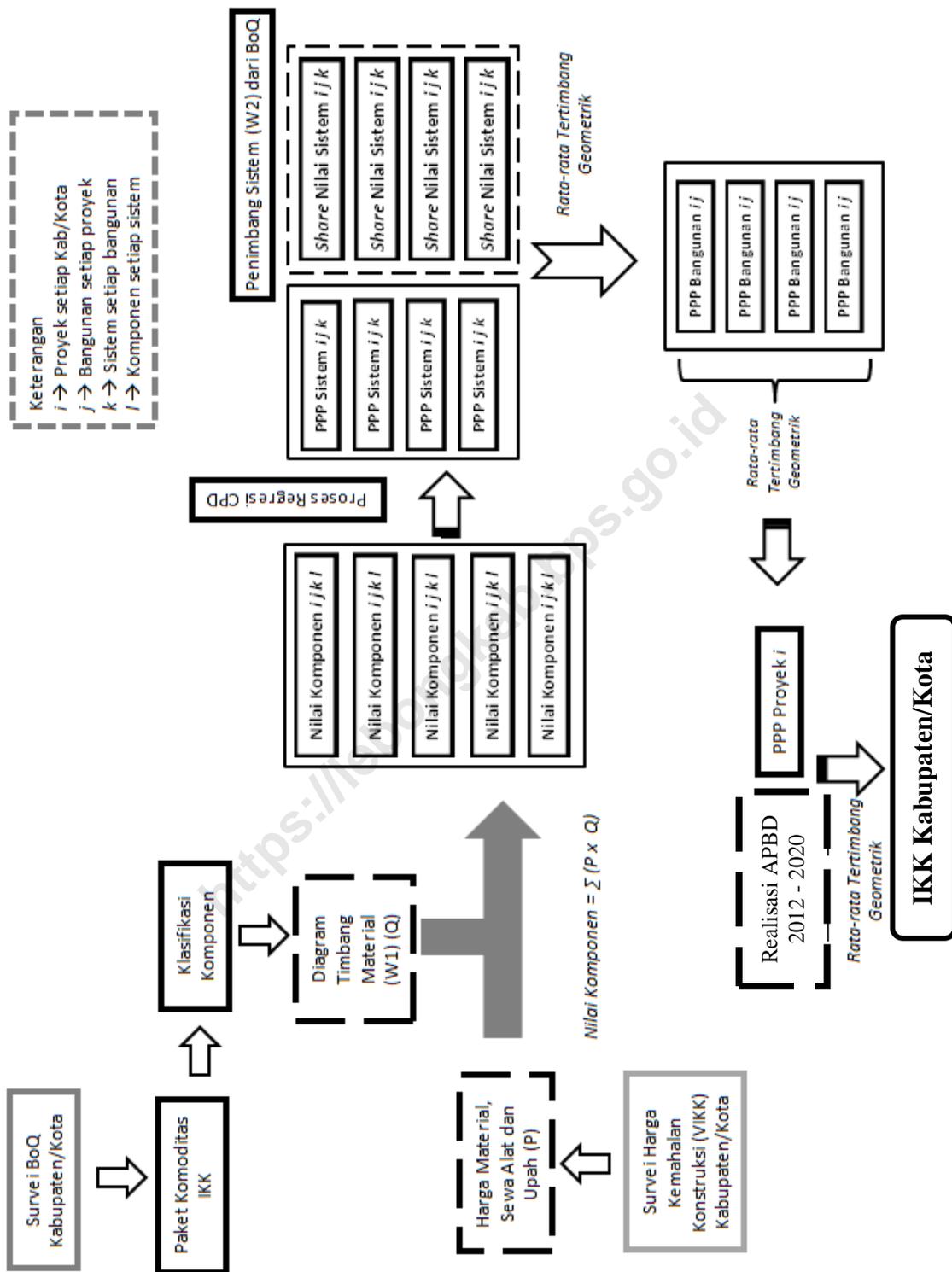
Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2021 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012-2020. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2021 dilalui melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ.
2. Menghitung nilai komponen yakni jumlah dari perkalian antara data harga hasil survei kemahalan harga konstruksi (SHKK) dengan diagram timbang material.
3. Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, bangunan, dan sistem untuk memperoleh PPP sistem.
4. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
5. Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.

Proses penghitungan IKK 2021 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang dapat dilihat di bagan berikut.

Gambar 7. Proses Perhitungan IKK 2021



Perubahan Kuesioner SHKK

Sejak tahun 2013 kegiatan pencacahan SHKK dilakukan dengan menggunakan satu buah kuesioner IKK yang didalamnya terkandung semua jenis barang dan kualitas. Seiring dengan perkembangan situasi di lapangan dengan majunya perekonomian maka metode pencacahan tersebut sudah tidak efisien bagi pencacah lapangan. Oleh karena itu, sejak triwulan ketiga tahun 2020 kegiatan pencacahan SHKK dilakukan dengan menggunakan kuesioner VHKK berbasis responden. Adapun jenis dokumen yang digunakan dalam pencacahan SHKK 2020 triwulan III yakni:

1. Kuesioner VHKK2020.MNPL (Material Natural dan Produk Lanjutannya)
2. Kueioner VHKK2020.MP (Material Pabrik)
3. Kuesioner VHKK2020.SAU (Sewa Alat Berat dan Upah Jasa Konstruksi)

Perubahan juga mencakup isi kuesioner dengan jumlah kolom yang lebih sedikit tetapi tidak mengurangi informasi komoditas. Adapun kolom yang hilang meliputi kolom responden, harga per satuan standar dan identitas responden yang dipindahkan ke Blok III. Selain hal tersebut, komoditas-kualitas yang mengalami perubahan mulai Triwulan III tahun 2020 antara lain:

1. Merek bak mandi tidak ditentukan dan disesuaikan dengan merek yang banyak dijual di kota/kabupaten tersebut.
2. Kayu lapis/triplek plywood 12 mm tidak dicacah lagi.
3. Komoditas seng plat terdapat penambahan kualitas dengan kriteria BJLS 28; L = 90.

4. Komoditas cat emulsi, kualitas cat genteng tidak dicacah lagi. Komoditas gypsum, dengan kualitas list polos tidak dicacah lagi.
5. Komoditas aluminium dengan kualitas Aluminium Lembaran 0,5 mm, panjang 2 m, lebar 1 m tidak dicacah.
6. Perubahan kualitas pada tangki fiber yang semula 2000-2200 liter menjadi 1200 – 1300 liter.
7. Komoditas lampu dengan kualitas lampu pijar 40 w tidak dicacah lagi.
8. Perubahan kualitas pada komoditas lampu yang semula 12 watt menjadi 3-5 watt.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

<https://lebongkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**

Jalan Raya Kompleks Perkantoran Jalur Dua- Tubei
Website : <https://lebongkab.bps.go.id>
Email : bps1707@bps.go.id